

**Interkonektivitas Multi Sektor dalam Upaya Pencapaian Agenda SDGs 2030 (United In Diversity)**

Dewa Putu Bhagastya Dharma1, Anak Agung Bagus Surya Widya Nugraha2, Ayu Putu Gari Kartika Dewi3

1Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Indonesia, [bhagastyadharma@gmail.com](mailto:bhagastyadharma@gmail.com)

2Dosen Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Indonesia, [aabasuwinu@unud.ac.id](mailto:aabasuwinu@unud.ac.id)

3Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Indonesia, [ikagary02@gmail.com](mailto:ikagary02@gmail.com)

***Abstract***

*Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Agenda is a mission that countries who adopt it strive to achieve. SDGs are a blueprint oriented towards peace and prosperity for a better world, with 17 goals to be achieved. Seeing the development in every country is differ to one another, there is a need for action from various sectors to jointly achieve the SDGs. These sectors are government, private, community, non-governmental organizations or NGOs is important. This collaboration is called the multi-sector role. Each sector must carry out its respective roles simultaneously. However, even though all sectors are performing their roles to achieve the 2030 SDGs, the interconnectivity of these sectors is still a discussion. In this paper, the researcher tries to describe the relationship of the multi-sector role in an effort to achieve the 2030 SDGs agenda, especially the role of NGOs through the case study of the United In Diversity Indonesia. In addition, it tries to analyze the efforts made by these sectors towards achieving the 2030 SDGs in Indonesia. The author uses qualitative methods, and finds that the role of each sector is interconnected to one another based on their duty and qualifications in each initiative for the 2030 SDGs.*

*Kata Kunci: Interconnectivity, Multi Sector, Non Govermental Organization, and Sustainable Development Goals*

**Pendahuluan**

Permasalahan yang terjadi dalam lingkup lingkungan dan sosial sekarang membuktikan bahwa tata kelola yang terstuktur secara universal diperlukan untuk menghadapi permasalahan global baik yang sudah terjadi atau belum terjadi di masa kini maupun masa depan. Sustanaible Development Goals memiliki fungsi yang substantif dalam pengelolaan lingkungan global. Setiap poinnya menggambarkan bahwa secara sosial, ekonomi, dan politik tujuan pembangunan kehidupan manusia yang lebih baik dapat tercapai. Tidak hanya universal, sifat terperinci, dan transformatif dapat diserap oleh berbagai sektor kepentingan. Secara universal Sustanaible Development Goals mampu diterima dari berbagai sektor baik individu, pengusaha, negara, dan segala lapisan masyarakat. Sifatnya yang terperinci dengan berbagai indikator yang jelas membuat tidak hanya menjadi acuan tetapi menjadi batasan capaian yang signifikan. Tidak hanya itu, transformasi yang mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi suatu bentuk kepentingan ekonomi yang unik. Berbeda dengan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), Sustainable Development Goals dapat diterapkan dari penduduk lokal (individu) dapat berkontribusi baik dalam skala yang kecil atau besar, karena utamanya akan berdampak pada perubahan yang berkelanjutan. Sehingga kehidupan yang damai, kualitas hidup yang baik, dan keperluan kehidupan dasar manusia dapat tercapai secara berkelanjutan. Prinsip inilah yang menggiring bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi suatu prinsip penting bagi setiap negara dengan mengingat permasalahan yang terjadi dalam status quo dan keinginan di masa mendatang yang ideal.

Seluruh negara sedang bersiap bersiap dalam merefleksikan pencapaian mereka untuk agenda SDGs 2030. Terhitung waktu yang tersisa untuk setiap negara melakukan pelaporan untuk pencapaian SDGs mereka hanya tersisa kurang dari 6 tahun. Agenda SDGs 2030. Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah panduan yang disebarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa bertujuan untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet, saat ini dan untuk masa depan. SDGs memiliki 17 poin, dan sebuah bentuk seruan yang mendesak bagi negara maju untuk bertindak dalam suatu kemitraan global. Dalam menghadapi dan melakukan penyelesaian berbagai masalah global seperti mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan beriringan dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi – sekaligus mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan (UN Dept. of Economic & Social Affairs, n.d.) Dari sana bisa terlihat bahwa untuk mengatasi satu masalah, perlu dukungan dan keterkaitan dengan penyelesaian masalah lainnya. Setiap negara yang berhasil mencapai dan menjawab semua bagian dari 17 poin SDGs itu berarti memiliki status negara yang makmur dan maju. 17 poin SDGs tersebut merupakan standar dalam kehidupan setiap negara, utamanya negara yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.

Mulai dari setiap hambatan di lingkup global yang saling berhubungan dalam penyelesaiannya, begitupun dari aktor dan pihak yang memiliki andil untuk mengatasi masalah tersebut dan berusaha mencapai agenda SDGs 2030. Pihak - pihak ini datang dari berbagai sektor, yakni sektor pemerintahan negara, sektor privat, sektor masyarakat, dan sektor organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat.. Aktor aktor ini lah yang bergerak secara aktif untuk berusaha mencapai agenda SDGs 2030. Seperti dijelaskan diatas tadi, dalam melaksanakan penyelesaian masalah, keterlibatan dari penduduk dunia haruslah mencakup semua bagian, karena permasalahan dunia adalah permasalahan bersama. Penulis berusaha untuk menganalisis berbagai peran dari masing masing sektor, utamanya adalah peranan organisasi non pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat. Seluruh serkor secara langsung maupun tidak langsung akan menjalankan peranan masing masing secara bersamaan dan pastinya akan saling memiliki keterhubungan atau interkonektivitas.

Dalam tulisan kali ini, penulis berusaha mengambil salah satu sektor dan melakukan analisis terhadap peranannya, serta menjelaskan interkonektivitas atau keterhubungan yang terjadi. Penulis menggunakan sektor organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat yakni United in Diversity. United In Diversity atau UID merupakan sebuah NGO yang melabelkan diri sebagai sebuah forum edukasi yang dibentuk tahun 2003 oleh MIT Sloan School of Management, Universitas Indonesia, dan GT Group Sinar Harapan. UID memiliki tujuan untuk menginspirasi pihak - pihak di sektor lain untuk berkolaborasi. UID berperan sebagai katalis untuk menumbuhkan kepemimpinan, menciptakan kemitraan, dan mengarusutamakan SDGs. UID menghasilkan aksi kolaboratif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) bagi Indonesia dan sekitarnya dengan esensi kebahagiaan. UID memiliki berbagai program yang dilaksanakan dengan orientasi SDGs 2030, namun pada tulisan kali ini, penulis akan membahas terkait salah satu programnya yaitu Tri Hita Karana Forum untuk menjelaskan juga interkonektivitas sektor lain dalam upaya SDGs 2030.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk tulisan ini, yakni “Analisis Peran ‘Aisyiyah Wilayah Gorontalo Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)” oleh Indah Wardaty Saud dan lainnya. Penelitian yang kedua adalah “Analisis Multi-Stakeholder Partnership Dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2020” oleh Marcerio Britama Putra dan kawan kawan. Dari kedua penelitian ini, kebaruan yang diberikan oleh tulisan kali ini adalah, dari penelitian pertama hanya berfokus pada peran organisasi Aisyiyah Wilayah Gorontalo terhadap SDGs sendiri dan tidak melakukan penjelasan lebih lanjut terkait kolaborasi dari multi sektor. Untuk penelitian kedua hanya berfokus pada kolaborasi multi sektor (dalam penelitian tersebut dikatakan multi-stakeholder) pada isu dan permasalahan lingkungan saja. Tulisan atau penelitian penulis menggunakan systems theory atau teori sistem untuk melakukan analisis terhadap intekonektivitas yang terjadi serta membedah masing masing peranan sektor. Teori sistem memaparakan kerangka kerja yang berguna dalam mengatur struktur kolaboratif multisektor dan melakukan evaluasi serta menggambarkan sifat saling ketergantungan antar komponen (sektor) untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan etis (Abelaye-Mateo, 2022). Tujuan penulisan adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait keterhubungan dari peranan multi sektor dalam upaya mencapai SDGs 2030, yang mana dalam tulisan ini menggarisbawahi peran organisasi non pemerintah atau LSM United In Diversity sebagai katalis atau penggerak upaya pencapaian SDGs tersebut.

**Metode**

Penelitian tentang Interkonektivitas Multi Sektor dalam Upaya Pencapain Agenda SDGs 2030 (United In Diversity) menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui data yang diperoleh nantinya akan diuraikan guna menjelaskan lebih gamblang jawaban permasalahan penelitian, yakni peran setiap sektor dan keterkaitannya melalui NGO atau LSM UID. Terdapat dua tipe data yang diperoleh, data primer diperoleh melalui wawancara dan data langsung dari sekretariat United In Diversity Bali Campus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai artikel, jurnal, penelitian lain, dan situs resmi SDGs 2030, Tri Hita Karana Forum, dan United In Diversity. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan data-data yang telah dikumpulkan dilakukan reduksi data untuk memilah setiap poin agar materi terfokus sesuai dengan maksud penelitian. Setelah reduksi data, selanjutnya adalah tahap klasifikasi data yang dikelompokkan untuk mempermudah penulis mengaitkan data satu dengan lainnya, dilanjutkan dengan melakukan penyusunan data-data yang telah direduksi dan diklasifikasikan sebelumnya dan disusun untuk mengkaji secara teoritis dan menelisik keterkaitan dari masing masing unsur yang ada.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Urgensi Sustainable Development Goals 2030**

Ambisi SDGs memiliki fungsi yang substansial dalam kondisi global. Sebagai perpanjangan MSGs, *Sustainable Development Goals* yang ditetapkan pada 2015diharapkan mampu menjadi acuan bagi negara-negara, terkhusus negara anggota PBB untuk mampu membawa perubahan yang substantif. Kondisi dunia saat ini menggambarkan bahwa situasi krisis yang yang dialami mengarah pada posisi pesimistik karena  pemerosotan yang aboslut dalam segi lingkungan ataupun kondisi hidup manusia.  Dalam segi lingkungan, perubahan iklim yang drastis membawa implikasi yang berkepanjangan terhadap kondisi lingkungan global. Perubahan iklim ini menyebabkan lebih dari 800 juta orang mengalami kondisi kebakaran, kekeringan yang menyebabkan krisis terhadap air, dan bencana alam lainnya. Permasalahan perubahan iklim ini juga menyebabkan para pembisnis merasakan penurunan drastis sekitar $1 Trilliun USD dalam lima tahun terakhir. Di saat yang bersamaan masalah iklim ini juga diikuti permasalahan lingkungan seperti degradasi hutan dan laut. Kondisi hutan yang semakin menipis, kualitas air dan tanah yang menurun akibat polusi plastik dan bahan kimia, serta variatif hewan dan tumbuhan yang menurun seiring tahun. Berbicara mengenai ketertinggalan, lebih dari 700 juta orang tercatat mengalami kemisikinan yang ekstrim dengan pendapatan kurang dari $2 USD per-harinya (WBCSD, 2015). Masih ada situasi kerja paksa terkhusus dilakukan anak-anak serta permasalahan kelaparan. Sustanaible Development Goals hadir untuk membantu meminimalisir bahkan menghilangkan pemerosotan baik dalam permasalahan kemiskinan, lingkungan ataupun permasalahan global lainnya.

Dengan tema besar “Changing Our World: agenda 2030 for *Sustainable Development*”  Prinsip dari SDGs terkandung dalam ke-tujuh belas poin yang dicantumkan oleh PBB (United Nations, 2015). Secara garis besar prinsip  dasar dari SDGs antara lain:

1. Pembangunan secara keseluruhan baik dilakukan oleh pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, *private sector*, ataupun akademisi.
2. “*Leave No One Behind”* merupakan prinsip SDGs untuk mengangkat dua hal. Pertama tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini secara keadilan prosedural dan sejauh mana SDGs mampu menjawab permasalan masyarakat internasional ataupun kelompok yang tertinggal (ITS SDGs Network, 2015).

Berdasarkan dari kondisi global di atas dan prinsip dasar yang dipegang teguh oleh SDGs, adapun tujuan dari SDGs secara spesifik antara lain;

1. Dimensi ekonomi

Tujuan SDGs dalam dimensi ekonomi tentunya mengharapkan adanya kestabilan ekonomi secara global. Setidaknya, orang-orang dapat hidup jauh dari kata kemiskinan. Tidak hanya itu, informasi pasar dan ketidakstabilan harga terutama harga pangan yang merupakan kebutuhan pokok tidak mencapai angka yang ekstrim. Perputaran ekspor dan impor dalam pasar dunia juga diharapkan dalam kondisi yang stabil. Sehinggga, pembangunan yang inklusif, lapangan pekerjaan yang layak, dan infrastruktur yang memadai tercapai (Unsworth, 2023).

1. Dimensi lingkungan

Mengingat lingkungan memberikan substansi yang fundamental dalam kehidupan, SDGs menekankan bahwa perlindungan bagi ekosistem laut, darat, udara, dan lainnya harus dilakukan. Tidak hanya itu konservasi terhadap sumber daya alam juga menjadi prinsip penting dalam dimensi ini.

1. Dimensi sosial

Prinsip “No One Leave Behind” diikuti dua dimensi di atas tentunya juga mendukung perkembangan dalam dimensi sosial. Dengan kestabilan ekonomi, SDGs berharap ada kemajuan dan kesetaraan sosial dalam masyarakat internasional. Kesetaraan tersebut dapat mencakup kesetaraan gender, pendidikan, ataupun hal lainnya. Yang pada akhirnya berimplikasi pada punurunan kondisi kesenjangan sosial.

1. Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Keterkaitan tiga dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial tentunya tidak hanya diterima secara praktis oleh masyarakat internasaional. Legitimasi hukum sebagai suatu acuan tertulis dan bersifat aktual tentunya mengambil peranan yang cukup penting pula dalam *Sustainalble Development Goals* (BAPPENAS, 2018).

1. **United In Diversity dan Tri Hita Karana Forum**

United In Diversity, atau biasa disingkat UID merupakan suatu bentuk organisasi non pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan sebagai forum edukasi. United In Diversity (UID) berdiri di tahun 2003 oleh MIT Sloan School of Management, Universitas Indonesia, dan GT Group Sinar Harapan. Kemudian, UID Forum membentuk Yayasan Upaya Indonesia Damai, sebuah yayasan yang bekerja sama dengan universitas global dan lokal, pusat pemikiran, dan mitra tri-sektor untuk membentuk kepercayaan dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik bersama. UID bertindak sebagai katalisator, pusat pendidikan, dan pendorong untuk mengembangkan kepemimpinan, menciptakan kemitraan, dan mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan menerapkan pemikiran sistem dan praktik U Theory, UID memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara pemimpin, pemuda, dan komunitas adat untuk mengembangkan dan menerapkan solusi berkelanjutan bagi tantangan di wilayah ini. UID bertujuan untuk menginspirasi kolaborasi tri-sektor dan membentuk identitas nasional yang positif bagi Indonesia, dengan memanfaatkan kekuatan beragam dari rakyatnya. Meskipun berbasis di Indonesia, UID juga memiliki perwakilan di Singapura, Tiongkok, dan Amerika Serikat (United In Diversity, 2023). UID memiliki visi yakni untuk Indonesia yang bersatu dan damai melalui sinergi di antara beragam konstituen masyarakat Indonesia dan komunitas internasional. Selain itu UID juga memiliki misi untuk mencapai visinya, yakni Demi mencapai salah satu tujuannya, yakni melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030, UID mengeluarkan program - program yang sesuai dan beorientasi pada ketujuh belas poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Program - program yang dikeluarkan UID sangat beragam dan tentunya memiliki orientasi dan harus terdapat nilai dari SDGs 2030 didalamnya. Program - program dari UID diantaranya adalah Bekal Pemimpin, Co-Class, IDEAS, Happy Digital X, Workshop dan Seminar bulanan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu program atau acara yang diwadahi oleh UID adalah Tri Hita Karana Forum 2022.

Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development Goals, seperti namanya adalah sebuah forum yang dilaksanakan mulai dari tahun 2013. Tri Hita Karana Forum atau biasa disebut THK Forum diinisiasikan oleh pemerintahan Indonesia dan United In Diversity Indonesia (UID) (THK Forum, n.d.). Forum THK memiliki tujuan dalam penyesuaian tindakan global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, dengan fokus yang khusus pada mobilisasi modal swasta dan inovasi untuk SDGs di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Forum THK berperan sebagai platform untuk pameran atau showcase dan merayakan komitmen, pengumuman, dan tonggak sejarah yang berkaitan dengan SDGs untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. THK Forum memiliki orientasi pada hasil, namun juga akan bersifat intim untuk memungkinkan interaksi dan diskusi yang tulus di antara para peserta untuk mengeksplorasi solusi demi mendorong investasi dan inovasi lebih lanjut untuk pembangunan berkelanjutan yang berkualitas tinggi, tahan terhadap perubahan iklim, dan inklusif di suatu wilayah. Komunitasnya terdiri dari tingkat senior pemerintahan, pengusaha, bank pembangunan, donor internasional, investor, pengembang proyek, bisnis, dan LSM.

Nama Tri Hita Karana Forum sendiri diambil dari konsep Tri Hita Karana di Bali, yang dimengertikan sebagai filosofi ‘Tiga Jalan Menuju Kebahagiaan’. Filosofi ini mengajarkan setiap individu untuk memiliki harmoni yang baik dengan manusia, lingkungan, dan pencipta. Tri Hita Karana berfokus pada hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam, dan manusia dengan aspek spritiual. Selain itu Tri Hita Karana sendiri juga berkaitan dengan dibaginya 17 poin SDGs kedalam 3 bagian atau Piramida SDGs meliputi people, nature, dan spiritual. Aksi ini diinisiasikan United In Diversity bersama Sustainable Development Solutions Network.

THK Forum memiliki dua nilai utama yang menjadi tujuan bersamanya, yakni Blended Finance dan Knowledge. Kedua poin itu dijadikan sebagai perbincangan utama dari THK Forum adalah karena pengusahaan untuk pencapaian SDGs 2030 membutuhkan modal yang besar. Modal tersebut pastinya untuk pengadaan segala jenis bidang dan aspek dalam poin pembangunan berkelanjutan, seperti lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Pengetahuan sangat memiliki nilain penting dalam SDGs karena memungkinkan pihak terkait dalam pembuatan dan pengambilan keputusan keputusan dan tindakan efektif menuju pembangunan berkelanjutan (Barrantes Briceño & Almada Santos, 2019). THK Forum terakhir kali dilaksanakan pada 2022 dengan mengusung tema Future Knowledge and Blended Finance.

1. **Interkonektivitas Peranan Multi Sektor di Tri Hita Karana Forum**

Berjalannya Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development Goals dapat dikatakan menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh bagian di lingkup global untuk membersamai berjalannya dan suatu bentuk upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Tri Hita Karana Forum atau THK Forum memiliki dasar untuk melibatkan banyak bagian atau sektor dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana kolaborasi, kerja sama, dan keterkaitan yang erat antar setiap sektor sangat dibutuhkan. Dalam wawancara bersama penulis, Mari Elka Pangestu, Mantan Managing Director of Development Policy and Partnership serta Utusan Khusus dalam Global Blended Finance Alliance menyatakan bahwa setiap sektor memiliki peranannya masing masing dalam membentuk suatu solusi atau co-creating untuk menjawab hambatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Setiap sektor saling terhubung dalam pelaksanaan Tri Hita Karana Forum dan tujuannya. Terdapat kolaborasi di seluruh komunitas investasi global dengan investor, donatur, pengembang proyek, dan pemimpin-pemimpin pemikiran. Tri Hita Karana Forum juga berupaya dalam memobilisasi $30 miliar dana yang diperoleh dalam modal komersial dan katalis untuk inisiatif atau kebutuhan terkait upaya pencapaian SDGs. Tri Hita Karana Forum memiliki berbagai harapan hasil dan inisiatf seperti energi transisi, penyelesaian masalah lingkungan dan kehutanan, pengupayaan pendanaan bagi bidang kesehatan, edukasi, dan lainnya. Ditambah dengan poin tentang pariwisata, carbon marketplace, inovasi di bidang kelautan, lahan dan permasalahan makanan, pariwisata, sirkular ekonomi dan aksi terhadap plastik, UMKM, dan masih banyak lagi (THK Forum, n.d.).

Seluruh inisiatif tadi bersama dikembangkan dan diupayakan untuk dicapai melalui keterkaitan dan peranan setiap sektor. Dalam membahas transisi energi terdapat pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan Jepang dan Amerika Serikat melalui Mekanisme Energi Transisi dan Just Energy Transition Partnership ada pula berbagai bagian kementerian di Indonesia, dan salah satu organisasi non pemerintah Rocky Mountain Institute. Setiap pihak disini melakukan pengupayaan terhadap bidang transisi energi, Lalu membahas terkait poin Blue Halo S, yang mana terdapat pemangku kepentingan seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dari pemerintahan. Perusahaan Digital GTech, dan masih banyak lagi. Dalam bidang kesehatan terdapat sektor pemerintahan yang berasal dari bidang terkait dengan berbagai sektor privat dan pendonor yang bergerak dalam upaya pendanaan tersebut seperti dalam $30 Bil ‘Health of Nations’ Fund. Bidang lain seperti inisiatif pariwisata berkelanjutan dan lanskap wilayah bersejarah, pemangku kepentingan dan juga pihak yang berkaitan terdapat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari sektor pemerintahan, Desa Serangan sebagai sektor masyarakat, dan Systemiq dari sektor privat, dan tentunya United In Diversity (UID) sebagai sektor NGO yang mewadahi kolaborasi.

Setiap kolaborasi dan keterkaitan peranan tadi terdapat upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dapat dilihat dari beberapa pembahasan, yang pertama dari program transisi energi, yang beorientasi dan beresonansi dengan poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 7 ‘Energi Bersih dan Terjangkau’. Selanjutnya untuk Blue Halo S yang merupakan sebuah bentuk gerakan dan mengimplementasikan kebijakan ekosistem biru demi perlindungan ekositem laut yang ada di Indonesia dan sekitarnya melihat potensi dari laut yang sungguh besar bagi ekonomi. Secara langsung segala gerakan dari Blue Halo S ini merupakan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 14 yaitu ‘Kehidupan Bawah Laut’, yang berusaha melindungi aspek kehidupan laut dan upaya untuk dapat memanfaatkan sumber daya laut secara baik dan berkelanjutan. Pada inisiatif selanjutnya terkait kesehatan $30 Bil ‘Health of Nation’ Fund berkaitan pastinya dengan poin 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni ‘Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik’, dalam inisiatif ini menggunakan model pendanaan bagi inovasi dalam bidang kesehatan oleh Prof. Andrew Lo dari MIT Sloan School of Management (THK Forum, n.d.). Selain itu inisiatif dari pariwisata berkelanjutan dan lanskap wilayah bersejarah berkaitan dengan poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8 pada ‘Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi’.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Project Management Office - Lead Interim United In Diversity, Danissa Aryani, masih terdapat insiatif dan harapan hasil yang masih dalam proses untuk berusaha diselesaikan, Sama seperti beberapa poin yang telah dijelaskam, pastinya terdapat keterkaitan entah melalui bentuk bantuan dana/donor, keterlibatan sebagai penggerak atau pelaksana, serta wadah untuk menjalankan kolaborasi. Ketiga aspek tadi, ‘bantuan’ melalui pendanaan, ‘pelaksana’ untuk menjalankan insiatif yang berusaha dituju, serta ‘kolaborasi’ atau kerja sama dalam bentuk wadah yang mempertemukan adalah peranan yang saling berkaitan dari masing masing sektor. Tri Hita Karana Forum mengumpulkan seluruh bagian untuk menyuarakan kerja sama dan kepentingan demi dunia yang sejahtera. Di Tri Hita Karana Forum terdapat berbagai partisipan dari seluruh sektor, mulai dari pemerintahan dengan bidang yang berkaitan sesuai inisiatif THK, organisasi non pemerintah, sektor privat seperti perusahaan penanaman modal, konsultan, perdagangan, dan sebagainya. Sektor publik dari berbagai kalangan pendidikan juga datang, seperti peneliti, pengajar, dan civitas akademika lainnya. Untuk sektor organisasi non pemerintah (NGO) atau LSM dihadiri oleh berbagai macam bagian seperti Yayasan Delterra, Konservasi Indonesia, Pijar Foundation, dan masih banyak lagi.

Dengan adanya berbagai pihak yang ada dalam susunan Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development Goals menunjukkan seberapa erat keterkaitan yang terjalin. Dengan Blended Finance yang menjadi topik utama THK Forum dapat memperjelas hal tersebut. Blended Finance ditujukan untuk kepentingan pendanaan upaya pencapaian nilai nilai SDGs, maka dari itu pendanaan tersebut berasal dari publik, filantropis, dan investasi privat. Selanjutnya dari Future Knowledge memperlihatkan bagaimana pengarusutamaan pengetahuan untuk masa depan sangat penting dalam upaya pertahanan pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait SDGs 2030. Maka dari itu kolaborasi dengan pihak - pihak terkait yang memiliki pengalaman bidang sangatlah penting. Kolaborasi yang terjadi dari setiap sektor memperlihatkan bagaimana keterkaitan terjalin disetiap agen, melihat kembali *system theory* atau teori sistem yang digunakan sebagai pisau analisis dapat dilihat bahwa tanpa adanya dukungan dari salah satu sektor saja, inisiatif tidak akan berjalan dengan baik. Tiga aspek yang telah saya sebutkan tadi yakni bantuan perencanaan biasanya datang dari sektor privat dimanaa terdapat pendanaan dan konsultasi, bagian ini juga dibarengi dengan adanya konsultasi bersama sektor pemerintahan sebagai inti pengamat dalam keadaan atau kondisi yang ada, tidak lepas juga dengan bagian masyarakat sebagai pihak yang berada pada tingkatan dasar dan mengalami dampaknya secara langsung. Dalam bagian pelaksanaan sektor pemerintah menjadi bagian dalam pembuat kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah dipertimbangkan demi kesejahteraan dan inisiatif yang sesuai, dan sektor masyarakat menerapkan kebijakan tersebut bersama dengan organisasi non pemerintah atau NGO sebagai wadah dan *enabler* untuk melaksanakan kebijakan tersebut, terlebih lagi dapat menjadi bagian untuk kolaborasi berbagai bagian demi pengetatan pelaksanaan suatu kebijakan. Setiap kebijakan atau tindakan disini memiliki konteks pada inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030.

**Kesimpulan**

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 adalah sebuah nilai Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi sebuah upaya bagi dunia yang lebih sejahtera. Agenda ini merupakan agenda mendesak dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet. Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs mencakup tindakan atau aksi yang dilakukan untuk dunia lebih baik bukan hanya dari satu dimensi, namun dari berbagai dimensi demi kebaikan semua. Namun hal tersebut pastinya memiliki tantangan tersendiri. Upaya pencapaian SDGs 2030 ini tak lepas dari keterkaitan dan peranan dari multi sektor, yakni sektor pemerintahan, sektor privat, sektor publik, dan sektor NGO atau LSM. Salah satu NGO atau LSM yakni United In Diversity melalui programnya yakni Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development Goals menunjukkan translasi dari interkonektivitas setiap sektor yang peranannya bertemu satu sama lain, mulai dari bantuan, pelaksanaan, dan kolaborasi serta kerja sama. Tri Hita Karana Forum berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan mengusung prinsip Blended Finance dan Future Knowledge yang merupakan kunci pengadaan dan pengelolaan nilai nilai SDGs di Indonesia dan negara berkembang. Kerjasama lintas sektor merupakan suatu hal yang harus berkembang dan menjadi bagian utama dalam upaya pencapaian SDGs, karena permasalahan dunia adalah permasalahan bersama. Melalui kolaborasi antar sektor atau dalam bahasan kali ini adalah peranan multi sektor merupakan sebuah jawaban atau solusi sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Contohnya dari inisiatif kesehatan, lingkungan, pariwisata, ekonomi, dan energi transisi merupakan bagian penting yang merupakan beberapa keterkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan dan diharapkan munculnya hasil yang baik pada *outcome* Tri Hita Karana Forum. Dengan demikian, kolaborasi dan keterkaitan dalam Tri Hita Karana Forum niscaya dapat membawa ke arah yang lebih baik dalam upaya pencapaian SDGs 2030.

**Daftar Pustaka**

Abelaye-Mateo, E. A. (2022). An Alternative Model for Multisector Collaboration and Social Change. Doctoral dissertation Saybrook University. <https://search.proquest.com/openview/db5285a167b548be4ba8ac0e397be674/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

BAPPENAS. (2018, Desember 23). Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia. SDGs Bappenas. Retrieved October 30, 2023, from <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>

Barrantes Briceño, C. E., & Almada Santos, F. C. (2019). Knowledge management, the missing piece in the 2030 agenda and SDGs puzzle. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20(5), 901-916.

Hassan, H. Y. (2023, February 1). The Engagement of Entrepreneurial Ecosystems with the Sustainable Development Goals. Portsmouth Research Portal. Retrieved October 30, 2023, from <https://researchportal.port.ac.uk/en/studentTheses/the-engagement-of-entrepreneurial-> ecosystems-with-the-sustainable

ITS SDGs Network. (2015). What is SDGs? ITB SDGs. Retrieved October 30, 2023, from <https://sdgsc.itb.ac.id/what-is-sdgs/>

THK Forum. (n.d.). Tri Hita Karana Forum on Sustainable Development. Retrieved November 6, 2023, from <https://www.thkforum.org/>

UN Dept. of Economic & Social Affairs. (n.d.). THE 17 GOALS | Sustainable Development. Sustainable Development Goals. <https://sdgs.un.org/goals>

United In Diversity. (2023). UID Company Profile. <https://www.unitedindiversity.org/>

United Nations. (2015, December 30). Sustainable Development Goals launch in 2016. the United Nations. Retrieved October 30, 2023, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/#>

Unsworth, S. (2023). Where from and by whom? Tracing academic and practitioner visions of energy systems change related to lower income countries. ProQuest Dissertations & Theses Global. <https://www.proquest.com/dissertations-theses/where-whom-tracing-academic-practitioner-visions/docview/2827702886/se-2>

WBCSD. (2015). Why the world needs the SDGs. SDG Essentials for Business. Retrieved October 30, 2023, from <https://sdgessentials.org/why-the-world-needs-the-sdgs.html>